



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ALNI**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **458737**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.075.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/110 m2 di KAB / KOTA TANAH DATAR, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA TANAH DATAR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA TANAH DATAR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 1.145 m2 di KAB / KOTA TANAH DATAR, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
5. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA TANAH DATAR, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **169.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI CARRY Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, YARIS MATIC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **224.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **51.500.000**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.519.500.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.519.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.